

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH
WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN
LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Diana Ulfa Sari

NIM. C91215115



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Ulfa Sari

NIM : C91215115

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi
Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah
dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi
dengan sumber rujukan.

Surabaya, 14 April 2019

Saya yang menyatakan



Diana Ulfa Sari
C91215115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan” yang ditulis oleh Diana Ulfa Sari NIM. C91215115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2019

Pembimbing,



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, MAg
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Diana Ulfa Sari NIM. C91215115 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa, 25 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



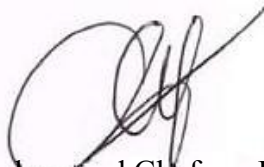
Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji II,



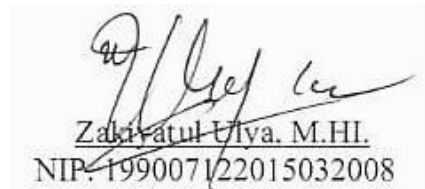
Dr. Makinudin, SH, M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji III,



H. Muhammad Ghufro, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Zakriatul Ulya, M.HI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 2 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diana Ulfa Sari
NIM : C91215115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : dianaulfasari31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN KEHADIRAN
WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2019
Penulis

(Diana Ulfa Sari)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan” adalah hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat di Desa Jugo dan dengan sumber lainnya. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik *deskriptif analisis* dengan pola induktif, sehingga memberikan pemahaman yang konkrit dan dapat ditarik kesimpulan.

Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan telah ada sejak dahulu dan dilakukan turun temurun sampai sekarang dengan alasan bahwa wali belum bisa dikatakan menyerahkan perwaliannya secara sepenuhnya apabila masih berada dalam majelis dan dianggap tidak memiliki kepentingan lagi di majelis tersebut. Wali juga dianggap kurang memiliki sopan santun apabila wali masih berada dalam majelis setelah melakukan pasrah wali kepada orang lain serta demi kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi. Jika ditinjau dari hukum Islam, tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk *al-‘urf al-sahīhah* akan tetapi bersifat makruh. Wali yang mewakilkan kepada orang lain masih memiliki hak untuk menyaksikan prosesi akad nikah karena sudah jelas peran masing-masing dalam majelis akad nikah sehingga tidak dikhawatirkan merangkap menjadi saksi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan disarankan: *pertama*, perlunya pemahaman masyarakat mengenai hukum dari kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali sehingga tidak ada perselisihan dikemudian hari; *kedua*, wali dapat hadir setelah melakukan pasrah wali kepada orang lain selama jelas posisi masing-masing dalam majelis akad nikah tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II WALI NIKAH, PERTIMBANGAN ‘URF DAN HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN ISLAM.....	21
A. Wali Nikah.....	21
1. Pengertian dan dasar hukum wali nikah	21
2. Syarat-syarat wali nikah	24
4. Kedudukan wali dalam pernikahan	36
5. <i>Taukīl Wali</i>	41
B. ‘Urf.....	48
1. Pengertian ‘urf.....	48
2. Macam-macam ‘urf.....	50
3. Kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’	52
B. Hukum Islam.....	54

1. Pengertian hukum Islam	54
2. Macam-macam Hukum Islam	54
BAB III TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN	57
A. Profil Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	57
1. Sejarah Desa Jugo	57
2. Geografis Desa Jugo	59
3. Kondisi Keagamaan Desa Jugo.....	59
4. Kondisi Pendidikan Desa Jugo	60
B. Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan Pasrah	
Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN	69
A. Analisis terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah	
dengan pasrah wali di desa jugo kecamatan sekaran kabupaten	
lamongan.....	69
B. Analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam	
akad nikah dengan pasrah wali di desa jugo kecamatan sekaran	
kabupaten lamongan	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam (KHI) tentang rukun dalam perkawinan meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.⁴

Salah satu unsur terpenting dalam perkawinan adalah adanya wali nikah. Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁵

Wali dalam perkawinan menurut jumhur ulama' selain ulama' Hanafiyah (Imam Malik Anas, al-Syafi'i dan Ibn Hanbali), termasuk dalam syarat dan rukun nikah. Imam Malik berdasarkan hadis dari Aisyah menyatakan bahwa, wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, sehingga tidak sah nikah tanpa wali. Pendapat ini juga diikuti oleh Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, al-Sya'bi dan al-Zuhri menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan perkawinan tanpa adanya wali, sedang suaminya sekufu maka nikahnya itu boleh.⁶

Wali ialah seseorang yang karena kedudukannya memiliki wewenang untuk bertindak terhadap dan atau atas nama orang lain karena orang lain memiliki suatu kekurangan pada dirinya sehingga secara hukum ia tidak akan memungkinkan bertindak sendiri baik atas dirinya maupun atas hartanya.⁷ Dalam perkawinan wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademik Pressindo, 2010), 116.

⁵ Ibid., 118.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, terj. Imam Al-Ghazali Said (Beirut: Dār Al-Jiil, 2000), 7.

⁷ Ita Musarofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 49.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan wali nasab. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab ke dalam *wali qarīb* dan *wali ab'ad*. *Wali qarīb* adalah wali yang memiliki hak *ijbar* terdiri dari ayah dan kakek. Sementara *wali ab'ad* terdiri dari saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, dan ahli waris kerabat lainnya.¹¹ Bila semua wali itu ada dan memenuhi syarat maka yang lebih diutamakan adalah wali nasab *qarīb*, wali *ab'ad* dapat menjadi wali *qarīb* bila wali tidak ada dan tidak memenuhi syarat, perwalian ini dapat diambil alih oleh hakim apabila wali nasab tidak ada dan tidak memenuhi syarat atau *adal* (enggan). Ketika wali *qarīb* sedang ihram, perwalian tidak lantas pindah pada wali *ab'ad* tetapi pindah kepada wali hakim.¹²

Seorang wali memiliki hak untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut bukan termasuk dalam klasifikasi wali nikah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya akad antara wali yang sah untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Wali

¹² Ibid., 51.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan yang dianalisis menggunakan Hukum Islam. Dengan demikian, dari uraian yang telah

[illegible]

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan kembali dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis, Zainal Abidin pada tahun 2013 (Mahasiswa UIN Syarif Kasim Riau) dengan judul “Persepsi Masyarakat Etnis Jawa terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)”.¹⁶

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan tentang tradisi

[illegible]

sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat Islam tentang *wakālah wali* dalam akad nikah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan *taukīl wali* dalam akad nikah.

4. Skripsi yang ditulis, Muhammad Darwis pada tahun 2008 (Mahasiswa UIN Malang) dengan judul “Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tentang *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah”.²⁰

Dengan demikian, penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun ada sedikit kesamaan yang akan diteliti oleh penulis. Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di antaranya sebagai berikut:

1. Objek penelitian yakni tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis Hukum Islam.

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Mengetahui tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

2. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya mengenai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang berkaitan dengan masalah ini pada suatu saat nanti.²²

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, sehingga masyarakat mengetahui dengan benar hukum dari kehadiran wali dalam akad nikah setelah pasrah wali sesuai tuntunan syari'ah.²³

²² Wiratno Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Barupress, 2014), 56.

²³ Ibid., 58.

G. Definisi Operasional

dalam suatu akad nikah sebagai pengganti dirinya. Pasrah wali juga bisa disebut dengan *taukīl wali*.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang ada.²⁵ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini di antaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari pengamatan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶ Dalam penelitian lapangan ini bersumber pada pandangan masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan permasalahan diatas, data pokok (data yang utama) yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan:

²⁵ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116.

²⁶ P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 82.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer.²⁸ Sumber sekunder diperoleh dari referensi dan literatur yang mempunyai hubungan dengan judul dan pembahasan penelitian penulis seperti buku-buku atau internet. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut: *Kifāyatul Akhyār*, karangan Taqiyudin Al-Hishni

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data. Pengolahan data ialah suatu proses dalam memperoleh data.²⁹ Untuk memperoleh data yang akurat dan diperlukan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya-jawab dalam penelitian antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara lisan dan saling bertatap muka, untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰ Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang terkait

²⁸ Ibid., 88.

²⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 197.

³⁰ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada masyarakat di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Penulis akan menggunakan wawancara terstruktur agar pembahasan atau jawaban yang dipaparkan narasumber langsung pada poin utama dan fokus pada pembahasan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan sumber data-data yang sudah dapat terkumpul.³¹ Pengambilan data itu sendiri dapat diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh obyek penelitian. Data yang dapat dikumpulkan adalah profil desa Jugo.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh secara langsung dari lapangan dan bahan pustaka, maka data tersebut dapat diolah. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Teknik *editing* adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa kembali data yang telah didapatkan dari lapangan dan bahan pustaka dalam hal kelengkapan, kejelasan, keselarasan, dan keterkaitan data satu dengan yang lain.³² Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai tradisi larangan kehadiran

³¹ Husnaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 73.

³² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118.

wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan.

b. *Organizing*

Teknik *organizing* adalah teknik yang digunakan untuk menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis.³³ Mengatur dan menyusun data dari Masyarakat di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sehingga mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

c. *Analizing*

Teknik *analizing* memiliki manfaat dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.³⁴ Teknik *analizing* adalah teknik mengumpulkan data kemudian dijabarkan dengan menggunakan bahasa yang telah penulis tulis di atas, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan mengenai Analisis Hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Widya Cahaya, 2012), 803.

³⁴ P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek...*, 105.

Untuk lebih mudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab II :Membahas tentang ketentuan umum wali nikah menurut hukum Islam yang meliputi wali nikah (pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam, urutan-urutan

³⁶ Ibid., 83.

wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, *Taukīl* wali) dan ‘*Urf*’ (pengertian ‘*Urf*, macam-macam ‘*Urf*, kedudukan ‘*Urf* sebagai dalil syara’).

Bab III : Membahas tentang tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan meliputi profil desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (sejarah Desa Jugo, Geografis Desa Jugo, Kondisi Keagamaan Desa Jugo, Kondisi Pendidikan Desa Jugo) dan deskripsi tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Bab IV: Membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Bab V : Berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil penelitian ini, dan di akhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda. Sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Wali terhadap manusia yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁴ Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang lain, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemashlahatannya sendiri.⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa wali ialah seorang laki-laki yang bertindak sebagai wakil dari mempelai perempuan dalam akad nikah, karena mempelai perempuan dianggap kurang cakap sehingga dibutuhkan wali dalam perkawinan. Wali merupakan syarat sah dalam perkawinan jika dalam perkawinan tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah.

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 1996), 345.

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Al-Baqarah: 232)”⁶

“Ali bin Abi Abdullah bin Mubasysyir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sinan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Isra’il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Nikah tidak sah kecuali jika disertai wali”*.⁷

“Muhammad bin Sulaiman Al Maliki di Bashrah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa Al Kharasyi menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai’ menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami dari Ishaq, dari Abu Burdah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Nikah tidak sah kecuali jika disertai wali”*”⁸

“Ibnu Abu Daud menceritakan kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku, Ibnu Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Sa’id, dia berkata: “Nikah tidak sah kecuali jika disertai wali, para saksi, mahar, kecuali pernikahan Nabi SAW”.⁹

2. Syarat-syarat Wali Nikah

Adapun syarat-syarat menjadi wali nikah antara lain:

- a. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang diharuskan adanya wali.¹⁰

- b. Orang yang merdeka.

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.¹¹

⁹ Ibid.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan....* 77.

¹¹ Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: (Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah dan Prateknya di Indonesia)”, *Jurnal Al-‘adalah*, No 2 Vo. IX (Juli, 2011), 168.

c. *Bāligh* (orang mukallaf)

Bāligh (orang yang mukallaf) itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu *bāligh* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini bahwa wali tidak boleh seorang yang masih kecil.¹²

d. Tidak berada dalam pengampunan

Orang yang berada dalam pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Sehingga orang yang berada dalam pengampunan tidak bisa menjadi wali karena kedudukan menjadi wali merupakan suatu tindakan hukum.¹³

e. Berakal sehat

Berakal sehat merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh wali menurut jumhur ulama. Hal ini dikarenakan orang yang akan diwalikannya itu dianggap kurang mampu dalam memilih pasangan untuknya dirinya.¹⁴

f. Islam

Disyaratkan wali nikah harus seorang Muslim jika perempuan yang hendak dinikahkannya adalah perempuan muslimah. Seorang kafir tidak sah menjadi wali bagi perempuan muslimah. Jika perempuan yang hendak menikah itu adalah seorang muallaf,

¹² Ibid.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan....* 77.

¹⁴ Muhammad Ra'fat 'Ustman, *Fiqh Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 85.

sementara walinya masih berstatus kafir, maka ia tetap tidak berhak menjadi wali dalam nikah, dan pernikahannya dianggap tidak sah.¹⁵

g. Adil

Adil di sini adalah terbebas dari perbuatan dosa besar, seperti tidak mencuri, zina, minum khamar, membunuh, memakan harta anak yatim dan dosa besar lainnya. Ia juga tidak boleh orang yang selalu melakukan perbuatan dosa kecil.¹⁶

h. Tidak sedang melakukan ihram

Karena status wali merupakan rukun dalam perkawinan atau seseorang yang harus ada dalam perkawinan, maka wali harus memenuhi beberapa syarat. Yang sudah disinggung di atas meliputi: laki-laki, baligh, berakal sehat, Islam, adil, tidak berada dalam pengampunan, tidak sedang melakukan ihram. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dijelaskan bahwa, yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

3. Macam-macam, Urutan-urutan Wali Nikah

Wali dibagi menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

a. Wali *nasab*

Wali *nasab* adalah wali nikah disebabkan adanya hubungan *nasab* dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan urutan kewalian para ulama fikih berbeda pendapat.

¹⁵ Ibid., 86.

¹⁶ Ibid.

Dalam kitab *Al-Mugni* dijelaskan bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (*al-mawlā*). Imam Syafi'i berpegang pada *aṣabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk *aṣabah* seorang perempuan, Sedangkan Imam Malik tidak menganggap *aṣabah* pada anak.¹⁸

- 1) Ayah
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu
- 4) Saudara laki-laki seayah saja

¹⁸ Ibid., 89-90.

- 1) Ayah seterusnya ke atas
- 2) Saudara laki-laki ke bawah
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah

[illegible]

Adapun perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali *aqrab*-nya tidak ada sama sekali.
- 2) Apabila wali *aqrab*-nya ada, tetapi pikun karena tua.
- 3) Apabila wali *aqrab*-nya nonmuslim.
- 4) Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa.
- 5) Apabila wali *aqrab*-nya gila.
- 6) Apabila wali *aqrab*-nya bisu/tuli.²⁰

Jika masih ada wali yang terdekat dan hadir pada saat tersebut, maka perkawinannya tidak boleh dilakukan oleh wali yang lebih jauh, kecuali wali *aqrab* karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali. dan apabila wali yang terdekat gaib, tidak ada di tempat dan tidak tentu arah rimbahnya. Imam Hanafi berpendapat, hak kewaliannya tersebut berpindah kepada wali berikutnya. Hal ini ditunjukkan agar tidak menyebabkan terganggunya perkawinan tersebut. Dan apabila suatu saat wali *aqrab*-nya datang, wali yang gaib tersebut tidak dapat membatalkan perkawinannya karena kegaibannya dianggap sama dengan ketiadaanya. Imam Syafi'i

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, 88.

Pada pasal 21 KHI menjelaskan mengenai empat kelompok wali nasab dalam kedudukannya pembahasan sama dengan pendapat jumhur ulama fikih Islam seperti: Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas; kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka; ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.²²

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (سُلْطَانٌ) *khalīfah* (pemimpin), penguasa (رَئِيسٌ) atau *qādī* nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.²³

uddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis*
ngan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004),

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), 73.

²³ Ibid., 92.

- 1) Wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak ada sama sekali.
- 2) Wali *aqrab* ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria. Wali *aqrab* yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada.
- 3) Wali *aqrab* ada, tetapi sedang ihram.
- 4) Wali *aqrab* ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya.
- 5) Wali *aqrab* ada tetapi menderita sakit pikun.
- 6) Wali *aqrab* ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai.
- 7) Wali *aqrab* ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar.
- 8) Wali *aqrab* ada, tetapi menolak untuk mengawinannya (*aḍal*).
- 9) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.²⁵

²⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 205.

[illegible]

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁸

Malik berkata, “Andaikata seorang janda berkata pada walinya, nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya”. Pendapat ini senada dengan pendapat Hanafi, Lais, Sauri, dan Auza’i. Berbeda dengan pendapat Syafi’i, bahwa “Yang menikahnya haruslah hakim atau wainya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri”.²⁹

e. Wali *mujbir*

Wali *mujbir* adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka dapat mengawinkan gadisnya tanpa persetujuan mempelai perempuan jika hal tersebut penting untuk kebaikan mempelai perempuan.³⁰ Wali *mujbir* dapat melakukan pemaksaan untuk mengawinkan gadisnya dengan syarat:

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 598.

²⁹ Slamet Abidin, et al., *Fiqih Munakahat I...*, 95.

³⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...*, 202.

- Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak laki-laki maupun perempuan yang belum baligh boleh melakukan perkawinan dengan wali *mujbir*. Berlakunya wali *mujbir* yakni seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang berada dalam perwaliannya bagi golongan tersebut tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu.³²

³¹ Ibid., 203.

[illegible]

f. Wali *aḍal*

Lain halnya jika *aḍal*-nya karena sebab nyata yang di benarkan oleh syara, maka tidak disebut *aḍal*, seperti wanita yang menikah dengan yang tidak sekufu atau menikah dengan mahar di bawah *mitsil*, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas dari peminang pertama. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak menghalangi perempuan yang akan menikah dan dan tidak boleh berbuat dzalim kepadanya. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadakan

³⁴ Siti Nur Jannah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)”, *Jurnal Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, No. 2 Vol. 2 (Juli, 2017), 14.

perkaranya ke Pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.³⁵

4. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah apabila akad perkawinannya tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.³⁶

Wali dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad adalah termasuk syarat sah suatu perkawinan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai wali termasuk syarat sah tidaknya dalam perkawinan.

Perbedaan tersebut dibagi dua kelompok antara lain:

- a. *Kelompok pertama*, mengatakan wajibnya kehadiran wali dalam perkawinan. Kelompok ini dipelopori ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, berdasarkan dalil-dalil di bawah ini:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه أحمد وابن ماجه والدرقطني)

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali” (HR Ahmad dan Ibnu Majah dan Daruquthni).³⁷

“Janganlah seorang wanita mengawinkan wanita lain dan jangan pula seorang wanita mengawinkan dirinya”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)³⁸

Hadis-hadis tersebut menjelaskan wajibnya kehadiran wali, karena wanita tidak berhak mengawinkan dirinya. Ketiadaan wali menyebabkan batalnya perkawinan.³⁹ Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengadakan perkawinannya sendiri. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.⁴⁰

“Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni).⁴¹

Hadis di atas, menguatkan wajibnya wali. Seandainya wali bukanlah syarat sahnya perkawinan, tidak perlu ada penggantinya yang dalam hal ini adalah hakim. Jadi, adanya pengganti wali dalam hal ketiadaanya menunjukkan ada kewajiban adanya wali.

⁴¹ Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni*, terj. Anshori Taslim..., 496.

b. *Kelompok kedua*, mengatakan bahwa wali bukanlah persyaratan sahnya perkawinan bagi janda. Oleh sebab itu, seorang janda dapat mengawinkan dirinya tanpa wali. Berdasarkan dalil di bawah ini:

لَا تُنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (رواه البخارى)

“Seorang janda tidak bisa dinikahkan sampai diminta pendapatnya dan gadis tidak dinikahkan sampai dimintai izinnya”.⁴²

Bagi janda, wali bukanlah syarat perkawinan sedangkan gadis, wali hanya dimintai izin saja. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri perkawinannya tanpa adanya wali.⁴³ Dengan kata lain akad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah pernikahannya sah.

Seorang perempuan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahannya dan atas dirinya sendiri sementara ia masih memiliki wali nasab disyaratkan harus *kafā'ah*⁴⁴ dan pemberian maharnya tidak

⁴² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Depok: PT. Fathan Prima Jaya, 2017), 374.

⁴³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, 69.

⁴⁴ *Kafā'ah* atau *kufu'* adalah kesepadanan, kesetaraan, atau kesamaan. Dalam hal ini kafa'ah merupakan kesamaan dalam beragama Islam.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁸

Mahar Mithil adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya, pada saat sebelum terjadi pernikahan. *Mahar mithil* mengikuti maharnya saudara perempuan. Jika tidak ada maka maharnya mengikuti wanita yang sederajat. *Masakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan apabila suami membuat pengaduan ke hakim.

Al-Hafidh, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: (Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah di Indonesia)*..., 174.

Al-Hafidh Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Fikih Perkawinan*..., 69.

⁴⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan....* 69.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.⁵⁰ Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan dan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.

⁵⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Gramedia Press, 2014), 8.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁵⁴

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, *wakālah* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam hal taṣarruf (pengelolaan).
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa, *al-wakālah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.
- c. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakālah* adalah permintaan untuk menggantikan seseorang yang memperbolehkan adanya taṣarruf yang seimbang pada seseorang dari pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah Swt dan hak-hak manusia.
- d. Ulama Syafi'iyah *al-wakālah*, berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat

Dari definisi berbagai ulama yang telah dipaparkan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa, *taukīl* atau *al-wakālah* merupakan perlimpahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakilnya dapat menempati posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam hak dan kewajiban, yang kuasanya dapat berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup.

Taukil wali nikah adalah suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang telah memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Kedudukan wakil dalam akad pernikahan hanya sebagai orang yang diutus untuk menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yakni sebagai orang yang diberi wewenang atau amanat oleh wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Sehingga wali yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam suatu akad ijab qabul, maka wali tidak boleh menjadi saksi nikah.⁵⁶

⁵⁶ Iftidah, *Pandangan Masyarakat tentang Taukīl Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak...*, 92-93.

a. Orang yang berwakil (*muwakkil*)

b. Pihak yang dikuasakan (*wakīl*)

⁵⁷ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), 643.

⁵⁸ Iftidah, *Pandangan Masyarakat tentang Taukīl Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak...*, 93.

⁵⁹ Ibid.

- c. Sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*)

Syarat objek pemberi kuasa adalah suatu perbuatan yang dapat digantikan oleh orang lain, tetapi tidak boleh terhadap hal yang berkaitan dengan ibadah *maḥḍah*, yakni yang berhubungan dengan pribadi. Seperti salat, puasa, sumpah, bersuci dari hadas.⁶¹

Wali dapat mengangkat wakilnya dengan kekuasaan mutlak dan terbatas. Mengangkat wakilnya dengan kekuasaan mutlak adalah seorang wali yang ingin menyerahkan kuasa kepada wakilnya untuk melakukan apa yang dikuasakan tanpa syarat tertentu. Menurut Abu Hanifah bahwa, hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakilnya yakni tidak terikat dengan batasan tertentu. Sedangkan menurut Abu Yusuf dengan Muhammad mengatakan bahwa hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakilnya yakni terikat dengan batasan tertentu dengan melihat kebaikan mempelai perempuan.

⁶⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Juz 3*, terj. Imam Al-Ghazali Said (Semarang: Asy-Syifa', 2000), 370.

⁶¹ Iftidah, *Pandangan Masyarakat tentang Taukil Wali Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak...*, 93.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya taukil adalah sebagai berikut.⁶³

- Pada dasarnya banyak orang tua yang berkeinginan untuk menikahkan sendiri anak perempuannya saat proses ijab qabul, tidak diwakilkan kepada penghulu. Karena ketidakmampuan disebabkan ketererbatas ilmu atau kondisi perasaan hati yang tak menentu terkadang menjadi kendala sehingga pengucapan ijab diwakilkan kepada penghulu atau orang lain yang dipandang mampu.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 33-34.

[illegible]

(فرع) يشترط فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَزْوَاجٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجَ فَلَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجَ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَوَكَّيْلُهُ وَعَقَدَ الْوَكَّيْلُ لَمْ يَصَحِّ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَكَّيْلَ نَائِبُ الْوَلِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Dari pernyataan Imam Al-Hishni di atas bisa dipahami bahwa apabila seorang wali yang telah mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah lalu wali tersebut juga hadir pada majelis akad nikah tersebut maka pernikahan dianggap tidak sah. Atas dasar teks tersebut, sebagian masyarakat memahami bahwa keharusan wali

[illegible]

‘Urf adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perintahnya dan atau hal meninggalkan sesuatu yang disebut sebagai adat. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa, *‘urf* merupakan apa-apa yang telah dibiasakan oleh sekelompok masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *‘urf* disebut juga sebagai adat kebiasaan.⁶⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan terus menerus oleh manusia baik berupa perintah atau meninggalkan dan sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat tersebut.

a. *‘Urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara kedua belah pihak tanpa mengucapkan *sigat*. Contohnya: jual beli *mu’athah* yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diambilnya, tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dima’lumi bersama.

⁶⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 133.

Adapun macam-macam '*urf*' di antaranya sebagai berikut:

Adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya: Membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak maksimumnya. Begitu pula juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya.

Yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau pada wilayah tertentu saja. Misalnya: Kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “Satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian bahwa luas tanah 10 x 10 meter.

[illegible]

c. *Al-‘urf al-ṣaḥīḥah* (‘urf yang absah)

d. *Al-‘urf al-fāsidah* (‘urf yang rusak/salah)

[illegible]

bertambahnya pemahaman hukum Islam, adat tersebut berangsur-angsur mulai ditinggalkan.⁷⁰

3. Kedudukan ‘*Urf* sebagai Dalil Syara’

‘urf’ bukan merupakan dalil syara’ yang tersendiri. Umumnya ‘urf’ ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan demikian, dikhususkan lafal *āmm* dibatasi yang mutlak.⁷¹ Para Ulama telah sepakat dan menerima ‘urf’ sebagai dalil untuk pengambilan hukum, selama itu termasuk *al-‘urf as-ṣaḥīḥah* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ada beberapa alasan '*urf*' dapat dijadikan sebagai landasan hukum, di antaranya sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surah al-A'raf ayat 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.⁷²

Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan ma'ruf dapat difahami bahwa, hal yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan yang dikerjakan berulang-ulang, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷³

⁷⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), 210-211.

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 137.

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 554.

⁷³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 212.

Dapat difahami dari ayat di atas bahwasanya, perintah untuk mengerjakan sesuatu secara terus-menerus yang dianggap baik sehingga menjadi tradisi di kalangan masyarakat.

- b. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku dalam masyarakat yang sejalan dengan hukum Islam. Dan jika sebaliknya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan.⁷⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غَلَقًا
تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.⁷⁵

Para Ulama yang mengamalkan ‘urf dalam memahami dan menetapkan ‘urf ada beberapa persyaratan antara lain:

- a. *'urf* tersebut harus secara umum dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat. Hal tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau dilaksanakan sebagian kelompok tertentu.
- b. *'urf* harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat, pada waktu yang akan dijadikan sebagai hukum.
- c. *'urf* harus sesuai dengan syariat hukum Islam dan *'urf* dipandang, apabila bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta akal sehat.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 360.

- d. Dalam hal perselisihan '*urf*' hanya dipakai ketika tidak ada penolakan secara eksplisit yang sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.⁷⁶

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁷⁷

Dapat disimpulkan Hukum Islam yaitu syariat yang berarti aturan yang atur oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Macam-macam Hukum Islam

Adapun macam-macam hukum Islam sebagai berikut:

⁷⁶ Misno, Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, No. 2 Vol. 2 (Juli, 2016), 110.

⁷⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No.2 Vol.17 (Juni, 2017), 24.

**TRADISI LARANGAN KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH
DENGAN PASRAH WALI DI DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Desa Jugo merupakan suatu kawasan pedesaan yang memiliki tatanan yang spesifik dari sktruktur desa-nya, sehingga mampu menampilkan wajah pedesaan yang rapi. Penataan fisik dari struktur desa tersebut tidak lepas dari budaya masyarakatnya yang sudah turun temurun. Kebagusan desa Jugo dapat dirasakan mulai dari kawasan pradesa dengan hijau tumbuh-tumbuhan pada pinggiran jalan serta di depan rumah warganya, hal tersebut menambahkan kesejukan desa itu sendiri. Desa Jugo merupakan daerah desa yang unik dan spesifik karena di sepanjang desanya itu dikelilingi oleh tanaman bambu-bambu. Dengan banyaknya bambu-bambu itu sampai bisa dimanfaatkan warga desa untuk membuat kerajinan seperti *Jarang* (alat penangkap ikan), *gedek* (tembok yang terbuat dari bambu) dan biasanya juga di buat untuk atap rumah maupun digunakan untuk yang lain-lainnya.¹

Pada zaman dahulu Desa Jugo merupakan area hutan belantara dan dikelilingi oleh rawa-rawa. Tak seorang pun yang hidup dan menempati wilayah tersebut. Akan tetapi lama kelamaan hari berganti hari,

57

bahwa perbedaan itu memiliki tujuan yang sama yakni beragama Islam. Terdapat 2 Masjid dan 10 Mushallah yang terdapat di Desa Jugo. Adanya masjid dan mushalllah tersebut diharapkan dapat menunjang sarana dan prasarana kehidupan beragama.⁷

nikah setelah pasrah wali di Desa Jugo, maka peneliti akan memaparkan dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Jugo.

Kebanyakan masyarakat Desa Jugo wali nikahnya lebih memilih melakukan pasrah wali kepada penghulu atau Kiai yang dianggap lebih faham agama.

“Kebanyakan wali nikah dari masyarakat Desa Jugo lebih memilih melakukan pasrah wali kepada penghulu atau Kiai yang ada di desa tersebut karena dianggap lebih faham Agama serta keterbatasan kemampuan wali nikah untuk melafadzkan ijab akad nikah sendiri”.⁹

Menurut Kepala KUA Kecamatan Sekaran yang dulu yakni bapak Muhammad Abdul Wasit bahwa, hampir kebanyakan warga Desa Jugo saat wali nikah mempasrahkan walinya (taukil wali) kepada orang lain. Jika di persentasikan hampir 95% masyarakat mempasrahkan walinya dan 5% menikahkan sendiri.¹⁰

Menurut bapak Ahmad Syaironi, tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali ini telah ada sejak dahulu dan turun temurun sampai sekarang.

“Kebiasaan yang ada di Desa Jugo kalau wali telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, wali itu dilarang hadir di tempat yang akan dilangsungkan akad nikah itu. Kebiasaan ini dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Jugo, tradisi larangan kehadiran wali untuk tidak hadir di tempat akad nikah tersebut telah ada sejak dahulu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dan dilakukan turun temurun sampai sekarang, akan tetapi tidak diketahui secara pasti awal tradisi larangan tersebut terjadi di masyarakat”.¹¹

⁹ Ahmad Syaironi, *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.

¹⁰ Muhammad Abdul Wasit, *Wawancara*, Lamongan, 19 November 2018.

¹¹ Ahmad Syaironi, *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.

Menurut bapak Ahmad Syaironi, kedudukan wali dalam perkawinan yaitu wali nikah termasuk syarat sah dalam perkawinan.

“Dalam suatu perkawinan, kedudukan wali adalah harus ada dalam perkawinan karena wali merupakan syarat sah dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah”.¹⁴

Walaupun wali telah mempasrahkan wali kepada orang lain. Bukan berarti menghapuskan kedudukan wali sebagai syarat sah dalam perkawinan karena wali nikah merupakan keharusan yang ada dalam perkawinan.

Wali yang telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, jika dilihat dari hukum Islam, boleh atau tidaknya wali hadir dalam majelis akad nikah. Berikut pendapat yang memaparkan tentang hukum kehadiran wali setelah pasrah wali sebagai berikut:

Menurut Bapak Ahmad Syaironi bahwa:

“Wali dari mempelai perempuan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali. Jika wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut, ditakutkan wali merangkap menjadi saksi yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Sependapat dengan pendapat Ulama Syafi’iyah, wali itu tidak boleh merangkap menjadi saksi walaupun telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain”.¹⁵

Hal senada juga disampaikan oleh ustadz Nur Hasan bahwa:

“Apabila wali telah mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah tersebut. Dikarenakan bentuk kehatian-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa wali itu tidak

¹⁴ Ahmad Syaironi, *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.

¹⁵ Ibid.

boleh merangkap menjadi saksi walaupun telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain”.¹⁶

Wali dari mempelai perempuan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali. Jika wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut, ditakutkan wali merangkap menjadi saksi yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi itu disyaratkan bukan terdiri dari wali nikah, wali itu tidak boleh merangkap menjadi saksi walaupun perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain sebab fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.

Menurut bapak Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran yang sekarang)
yakni:

“Apabila wali telah mewakilkan perwaliannya untuk menikahkan, disunnahkan wali untuk menjauhi majelis akad nikah tersebut. Dikarena posisi wakil merupakan pengganti wali. Pada Kitab *Kifāyatul Akhyār* dijelaskan pada intinya apabila wali telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dan wali ikut hadir dalam majelis akad nikah tersebut maka pernikahannya tidak sah”.¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Muhammad Wasit (Kepala KUA Kec. Sekaran yang dulu):

“Berdasarkan pada Kitab *Kifāyatul Akhyār* yang menjelaskan apabila wali telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dan wali ikut hadir dalam majelis akad nikah tersebut maka pernikahannya tidak sah. Wali disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali”.¹⁸

¹⁶ Nur Hasan (Modin Desa Jugo), *Wawancara*, Lamongan, 12 Maret 2019.

¹⁷ Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran), *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.

¹⁸ Muhammad Abdul Wasit, *Wawancara*, Lamongan, 19 November 2018.

Mengenai larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali. Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa orang yang telah mewakilkan kepada orang lain tidak boleh berada ditempat akad tersebut. Biasanya wali langsung pergi dari majelis akad nikah tersebut untuk menemui tamu undangan maupun pergi ke tempat selain tempat yang digunakan untuk majelis akad nikah.²²

Ustadz Nur Hasan berpendapat salah satu faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali yaitu wali belum bisa dikatakan menyerahkan perwaliannya secara sepenuhnya kepada orang yang mewakili kalau wali masih berada dalam majelis akad nikah.

“Jika wali masih berada dalam majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali maka wali tersebut belum bisa dikatakan menyerahkan sepenuhnya perwaliannya kepada orang lain untuk menikahkan serta

²¹ Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran), *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2019.

²² Ibid.

wali dianggap tidak memiliki kepentingan lagi dalam majelis akad nikah tersebut karena sudah ada wakil wali".²³

Menurut ustadz Ma'ruf, bahwa faktor yang melatar belakangi tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali adalah adanya faktor sopan santun dari wali dan sudah menjadi adat istiadat di kalangan masyarakat.

“Apabila wali yang telah melakukan pasrah wali kepada orang lain dan wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut. Wali dianggap kurang memiliki sopan santun terhadap orang yang mewakili. Tindakan wali meninggalkan majelis akad nikah setelah pasrah wali dianggap sebagai tindakan kurang sopan santun tersebut”. Tindakan tersebut juga dilakukan karena disebabkan adanya kebiasaan yang terus menerus sehingga menjadi adat istiadat.²⁴

Menurut bapak Muhammad Abdul Wasit (mantan Kepala KUA Kec. Sekaran), faktor yang melatar belakangi tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali ialah bentuk kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi.

“Apabila wali masih berada dalam majelis akad nikah padahal wali sudah melakukan pasrah wali kepada orang lain, ditakutkan wali tidak bisa menjaga lisannya untuk diam saat pengucapan kata **“Sah”** oleh saksi-saksi setelah prosesi pengucapan ijab qabul. Larangan wali untuk tidak hadir dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali tersebut merupakan bukti kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi”.²⁵

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Muklisin (Kepala KUA Kec. Sekaran):

²³ Nur Hasan (Modin Desa Jugo), *Wawancara*, Lamongan, 12 Maret 2019.

²⁴ Ma'ruf, *Wawancara*, Lamongan 12 Maret 2019.

²⁵ Muhammad Abdul Wasit, *Wawancara*, Lamongan 19 November 2018.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak bisa dikatakan menyerahkan sepenuhnya untuk mewakili, jika wali masih berada dalam majelis akad nikah sedangkan wali telah mempasrahkan kepada orang lain serta wali tidak memiliki kepentingan lagi karena sudah ada wakil yang ditunjuk untuk mewakilkannya.
2. Wali dianggap kurang memiliki sopan satun apabila wali masih berada dalam majelis akad nikah tersebut dan sudah menjadi adat istiadat di desa tersebut.
3. Kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi.

[illegible]

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN
KEHADIRAN WALI DALAM AKAD NIKAH DENGAN PASRAH WALI DI
DESA JUGO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam perkawinan, kebanyakan wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa alasan yakni wali belum siap mengakadkan sehingga menjadi grogi, wali kurang faham dengan lafadz ijab qabul, kebiasaan untuk mewakilkan kepada penghulu atau ulama-ulama setempat.

69

Dengan demikian tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali termasuk produk hukum meskipun aturannya tidak tertulis dan bisa dijadikan sebagai landasan hukum dengan memperhatikan beberapa faktor yang melatar belakangnya, serta tradisi tersebut dilakukan terus menerus.

Masyarakat Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan menyakini bahwa apabila wali telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, wali tersebut dilarang hadir dalam majelis akad nikah. Hal yang terlarang tersebut sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Desa Jugo.

Meskipun tidak ada aturan yang tertulis. Pandangan masyarakat tentang tradisi larangan tersebut sudah ada sejak dahulu dan telah turun temurun sampai sekarang.

Wali yang telah mewakili perwaliannya kepada orang lain, tidak akan menghapus kedudukan wali dalam perkawinan. Wali yang mewakili perwaliannya kepada orang lain hanya mewakili urusan untuk menikahkan mempelai perempuan. Dan kedudukan wali masih tetap karena wali merupakan syarat sah dalam perkawinan, dan jika tidak ada wali dalam perkawinan maka pernikahannya dianggap tidak sah. Penulis sependapat dengan pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menyatakan wali harus ada dalam perkawinan dan jika tidak ada wali maka menyebabkan perkawinannya batal dan dianggap tidak sah.

Wali yang telah melakukan pasrah wali kepada orang lain, jika dilihat dari hukum Islam, boleh atau tidaknya wali hadir dalam majelis akad nikah.

Menurut bapak Nur Hasan dan Bapak Ahmad Syaironi bahwa, wali dari mempelai perempuan disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah setelah melakukan pasrah wali. Jika wali masih berada dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali, ditakutkan wali merangkap menjadi saksi yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah. Beliau sependapat dengan pendapat Ulama Syafi'iyah, saksi itu disyaratkan bukan termasuk dari wali nikah, wali itu tidak boleh merangkap menjadi saksi walaupun perwaliannya telah diwakilkan kepada orang lain karena fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.

(فرع) يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربعة ولي وزوج وشا هدي عدل ويجوز أن يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولي والله أعلم

“(Cabang) Dalam keabsahan akad nikah disyaratkan hadirnya empat orang yang terdiri dari wali, suami dan dua orang saksi yang adil. Wali dan suami diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain (untuk melakukan ijab qabul). Maka bila wali dan suami atau salah satunya telah mewakilkan kepada orang lain atau wali dan wakilnya hadir (pada saat akad nikah) lalu sang wakil melakukan akad nikah maka pernikahannya tidak sah, karena wakil adalah pengganti wali.”¹

Penulis setuju dengan pendapat bapak Muhammad Abdul Wasit, Muklisin, Ahmad Syaironi, ustadz Nur Hasan serta ustadz Ma'ruf bahwa apabila wali mempelai perempuan mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, wali disunnahkan untuk menjauhi majelis akad nikah tersebut karena kedudukan wakil adalah pengganti wali. Akan tetapi penulis memiliki pendapat yang berbeda karena keluar dari perselisihan lebih diutamakan, penulis berpedoman dengan kaidah fiqhiyah:

الْخُرُجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

¹ Taqiyudin Al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār* (Damaskus: Dār al-Basāir, 2001), 426.

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat desa Jugo bukanlah demikian. Dalam majelis akad nikah tidak hanya dihadiri oleh satu orang saksi saja, suami, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali akan tetapi masih banyak orang lain yang hadir menyaksikan akad nikah tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan wali hadir dalam majelis akad nikah meskipun wali telah mewakilkan kepada orang lain. Karena dalam majelis akad nikah tidak hanya dihadiri oleh satu orang saksi saja, suami, wali yang telah mewakilkan, dan orang yang mewakili wali akan tetapi ada banyak orang lain yang hadir menyaksikan akad nikah tersebut. Pernikahannya sah meskipun wali yang telah mewakilkan hadir dalam majelis akad nikah dan sekadar menonton prosesi akad, bukan merangkap sebagai saksi karena sebelum prosesi akad nikah sudah ditentukan dan ditetapkan peran masing-masing.

[illegible]

Adat adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh manusia yang selalu mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda. Selain itu, adat merupakan hasil produk manusia yang terus diuji oleh waktu, terlebih pada era modern ini. Dalam era ini, nilai-nilai lokal lambat laun mulai mengalami perubahan dan nilai-nilai lokal mulai hilang oleh nilai modern. Meskipun demikian, berbeda dengan masyarakat Desa Jugo yang masih mempertahankan adat maupun tradisi yang ada, terutama tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah setelah pasrah wali tersebut.

Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut dengan kata ‘*urf*’ merupakan sesuatu yang telah dibiasakan dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘*urf*’ juga dikenal sebagai adat kebiasaan dan telah menjadi tradisi untuk melakukan atau meninggalkan. Dalam memahami dan menetapkan ‘*urf*’ ada beberapa persyaratan antara lain:

- [illegible]

Dengan demikian berdasarkan syarat-syarat *'urf* di atas maka tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk dalam kategori *al-'urf al-ṣaḥīḥah* akan tetapi bersifat makruh. Wali yang mewakilkan kepada orang lain masih memiliki hak untuk menyaksikan prosesi akad nikah karena sudah jelas peran masing-masing dalam majelis akad nikah sehingga wali tidak dikhawatirkan merangkap menjadi saksi.

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi larangan kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan telah ada sejak dahulu dan dilakukan turun temurun sampai sekarang dengan alasan bahwa wali belum bisa dikatakan menyerahkan perwaliannya secara sepenuhnya apabila berada dalam majelis dan dianggap tidak memiliki kepentingan lagi. Wali juga dianggap kurang memiliki sopan santun apabila wali berada dalam majelis setelah pasrah wali serta demi kehati-hatian agar wali tidak merangkap menjadi saksi.
2. Tradisi larangan kehadiran wali dalam akad nikah dengan pasrah wali di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk *al-‘urf al-ṣaḥīḥah* akan tetapi bersifat makruh. Wali yang mewakilkan kepada orang lain masih memiliki hak untuk menyaksikan prosesi akad nikah karena sudah jelas peran masing-masing dalam majelis akad nikah sehingga tidak dikhawatirkan merangkap menjadi saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Taufik. “Sejarah Desa Jugo”, dalam <http://googleweblight.com/i?u=http://desajugo.blogspot.com/2017/04/sejarah-hesa-jugo.html%3D0&hl=id-ID>, diakses pada 22 Maret 2019.
- Abbas, Hakam. “*Taukīl Wali Nikah*”, dalam <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/taukīl-wali-nikah.html?m=1>, diakses pada 31 maret 2019.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet, et al. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Abidin, Zainal. “Persepsi Masyarakat Etnis Jawa terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)”. Skripsi--UIN Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, “*Taukīl Wali Nikah*”, dalam <http://langit-biru-pembaharu.blogspot.com/2013/06/analisis-hukum-islam-terhadap-kasus.html?m=1>, diakses pada 31 maret 2019.
- Anam, Rahmatul. “*Perwakilan Perwalian dalam Majelis Akad Nikah (Studi Analisis Pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al-Mailabari Dalam Kitab Fathul Mu’in)*”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2010.
- Arifin, M. Shultonul. “Pandangan Masyarakat Terhadap *Wakalah Wali* dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan)”. Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.
- Badri, Abdul. “Larangan *Taukīl Nikah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”. *Jurnal Inklusif*, No. 2, Vol 2, Desember, 2017.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2011.
- Darwis, Muhammad. “Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tentang *Wakālah Wali* dalam Akad Nikah”. Skripsi--UIN Malang, Malang, 2017.

- eng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda
2000.
- hniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzab*. Jakarta: Lentera. 199
- ayatun. *Wawancara*. Lamongan, 11 Maret 2019.
- . *Wawancara*. Lamongan, 17 November 2018.
- lisin (Kepala KUA Kec. Sekaran). *Wawancara*. Lamongan 11 Maret 20
- arrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prose*
Surabaya: UINSA Press, 2014.
- ipikin, Imam. *Kaidah Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2001.
- uko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- nan, Abdul. *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Ind*
Jakarta: Cendana Press, 1984.
- q, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997
- mat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: (Studi Pemikiran Sya*
Hanafiyah dan Prateknya di Indonesia). *Jurnal Al-'adalah*, No 2, V

